

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **A. Sejarah Bank Indonesia**

Pada zaman dahulu alat tukar yang digunakan masyarakat adalah uang yang terbuat dari logam (mata uang logam). Mata uang ini memiliki keunggulan karena nilai intrinsiknya sama dengan nilai material uang tersebut. Namun, karena bahan baku untuk membuat uang tersebut jumlahnya terbatas menyebabkan jumlah uang menjadi terbatas. Akibatnya dapat menghambat kegiatan perdagangan dan perekonomian secara keseluruhan. Untuk alasan itu, maka diciptakanlah sistem uang kertas yang nilainya dijamin oleh suatu badan penjamin sekaligus sebagai penyimpanan yang dinamakan "Bank". Meskipun demikian, dalam praktiknya ada kelemahan-kelemahan dalam sistem uang kertas karena masing-masing bank membuat aturan dan jenis-jenis uang kertasnya sendiri sendiri, hal ini berpotensi merugikan masyarakat. Sejalan dengan berkembangnya sistem perbankan maka dibutuhkan adanya lembaga yang berfungsi sebagai stabilisator perekonomian, lembaga inilah yang dinamakan Bank Sentral.

Dalam perkembangan lebih lanjut, Bank Sentral memiliki peran strategis dalam bidang moneter, keuangan dan perbankan. Peran tersebut terlihat dari fungsi dan tujuan lembaga ini yang tidak identik dengan bank komersial, bank tabungan, atau lembaga keuangan lainnya. Peran Bank Sentral tampak pada tugas utamanya, yaitu: (1) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, (2) mengawasi Bank, dan (3) menjaga kelancaran sistem pembayaran. Tugas utama tersebut tidak selalu sama antara satu Bank Sentral dengan Bank Sentral lainnya. Misalnya ada Bank Sentral yang bertugas untuk ketiga tugas tersebut, sementara itu, ada juga Bank Sentral yang hanya bertugas untuk sebagian dari tugas tersebut, misalnya hanya menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter. ketiga tugas utama Bank Sentral tersebut juga dijalankan oleh BI sebagai Bank Sentral di Indonesia. Meskipun demikian, berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka tugas BI yang kedua akan dialihkan ke OJK sejak tanggal 01 Januari 2014.

Jika dilihat dari sejarah berdirinya, keberadaan Bank Sentral diawali dengan berdirinya Bank Sentral Swedia (The Riskbank of Sweden) yang beroperasi pada tahun 1668 dan diikuti oleh berdirinya Bank Sentral Inggris (The Bank of England) yang beroperasi pada tahun 1694. Hingga tahun 1990-an sudah ada 173 Bank Sentral. Sementara itu, jika dilihat

dari segi tugasnya, Bank Sentral bertugas sebagaimana tugas bank-bank lainnya. Dalam perkembangan selanjutnya, secara gradual Bank Sentral diberi tugas dan tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan dengan bank lainnya, misalnya menerbitkan uang kertas, dan bertindak sebagai agen dan bankir pemerintah. Di samping, mendapat tugas dan tanggung jawab yang lebih besar, Bank Sentral juga terlepas dari beberapa tugas dan tanggung jawab utama bank pada umumnya. Artinya, dalam perkembangan lebih lanjut tujuan dan tugas Bank Sentral tidak identik lagi dengan bank komersial, bank tabungan dan lembaga keuangan lainnya.

Pada mulanya Bank Sentral dinamakan bank sirkulasi (bank of issue) yang bertugas mempertahankan konversi uang kertas yang dikeluarkan terhadap emas atau perak atau keduanya. Dalam perkembangannya bank sirkulasi ini menjalankan fungsi mengawasi dan mengatur perbankan, mengontrol atau mengendalikan jumlah uang beredar dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Bank of England merupakan bank issue pertama yang memperoleh posisi sebagai Bank Sentral dan mengembangkan dasar-dasar “the art of central banking”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bank sentral Inggris secara umum diterima sebagai gambaran evolusi dasar dan teknik Central Banking. Sementara itu, Bank Sentral Amerika Serikat bernama The Federal Reserve baru beroperasi pada tahun 1913.

Sebagaimana halnya dengan Bank Sentral di negara-negara berkembang lainnya. Bank Indonesia (BI) diberikan mandat untuk menyelenggarakan fungsi Bank Sentral di Indonesia. Hingga saat ini BI mengalami evolusi yang bermula sebagai bank komersial yang kemudian berkembang menjadi bank sirkulasi dan selanjutnya menjadi Bank Sentral yang modern dengan tujuan yang fokus serta independen sesuai dengan amanat UU No. 23/1999 Tentang BI yang kemudian diamandemen menjadi UU No. 3/2004 Tentang BI.

BI berawal dari De Javasche Bank NV (DJB) yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 24 Januari 1827. Pada waktu itu, DJB bertindak sebagai bank sirkulasi dan menjalankan beberapa fungsi Bank Sentral lainnya serta melakukan kegiatan Bank Umum. Pemerintah Belanda memberikan hak oktrooi kepada DJB, yaitu hak untuk mencetak dan mengedarkan uang Gulden Belanda.

Pada perkembangan selanjutnya, pada tanggal 06 Desember 1951 Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU tentang nasionalisasi DJB. Selanjutnya pada tanggal 01 Juli 1953 dikeluarkan UU No.11 Tahun 1953 Tentang pokokpokok Bank Indonesia. Sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada tanggal 01 Juli 1953, maka bangsa Indonesia telah memiliki sebuah lembaga Bank Sentral dengan nama Bank Indonesia (BI), sejak saat itu, BI secara resmi menjadi Bank Sentral menggantikan fungsi DJB. Hingga tahun 1968 , tugas pokok BI sebagai Bank Sentral, selain menjaga stabilitas moneter, mengedarkan uang dan mengembangkan sistem perbankan, juga masih tetap melaksanakan fungsi bank umum (bank komersial). Meskipun demikian, tanggung jawab kebijakan moneter berada di pihak Dewan Moneter (DM) yang dibentuk oleh pemerintah. Tugas DM adalah mennetukan kebijakan moneter yang harus dilaksanakan oleh BI. Di samping itu, DM juga memberi petunjuk kepada direksi BI dalam menjaga kesetabilan nilai mata uang dan memajukan perkreditan dan perbankan.

Sadar akan kelemahan peran ganda yang diaminakan oleh BI yaitu kurang sehatnya perkembangan moneter bagi perekonomian, maka pemerintah pada tahun 1968 dikeluarkan UU No. 13 Tahun 1968 Tentang Bank Indonesia. UU ini menghapus peran ganda BI, yakni BI tidak lagi melaksanakan fungsi-fungsi bank komersial. Meskipun demikian, dalam UU ini BI tetap sebagai agen pembangunan dan sebagai kasir pemerintah serta bankers ban. Di samping itu, UU ini tetap mempertahankan tugas dan fungsi DM. Tugas pokok BI sebagai agen pembangunan terlihat pada tugas pokoknya, yaitu (1) mengatur, menjaga, dan memelihara stabilitas nilai Rupiah, (2) mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta (3) memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.

## **B. Visi Dan Misi Bank Indonesia**

Menjadi lembaga Bank Sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian yang rendah dan nilai tukar yang stabil adalah merupakan visi dari Bank Indonesia.

Selain itu Bank Indonesia juga memiliki Misi, yaitu:

1. Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
2. Mendorong sistem keuangan nasionalbekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber

pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.

3. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional.

4. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (governance) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan UU.

### **C. Tujuan Bank Indonesia**

Dalam kapasitasnya sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kesetabilan nilai rupiah. Kesetabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kesetabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kesetabilan terhadap mata uang Negara lain.

Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang Negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksud untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.

### **D. STRUKTUR ORGANISASI**

Uraian Tugas Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara:

#### **1. Kepala Perwakilan Bank Indonesia**

Adapun tugas-tugas pokoknya adalah sebagai berikut:

a. Merencanakan, mengarahkan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas pokok Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara mencakup bidang moneter, sistem pembayaran, dan manajemen intern.

- b. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas KKBI (Koordinator Kantor Bank Indonesia) dan Kantor Bank Indonesia yang berada dibawah koordinasinya.
- c. Menyediakan informasi dan masukan/sasaran untuk Pemerintah Daerah, Prbankan, dan pihak terkait dalam rangka pengembangan ekonomi daerah.
- d. Mengkoordinasi dengan pihak terkait upaya pemberdayaan sektor riil dan UMKM didaerah serta mendorong pengembangan potensi ekonomi daerah.
- e. Memberikan masukan kepada Kepala Kantor Pusat mngenai kondisi ekonomi dan keuangan daerah diwilayah kerjanya.

## **2. Grub Adivisory dan Pengembangan Ekonomi**

Grub Advisory dan Pengembangan Ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Divisi Advisory Ekonomi dan Keuangan.
  - a) Fungsi Data dan Statistik Ekonomi dan Keuangan
  - b) Fungsi Asesmen Ekonomi dan Surveilane
- 1) Divisi Pengembangan Ekonomi
  - a) Fungsi Koordinasi dan Komunikasi Kebijakan
  - b) Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM
- 3. Grub SP, PUR, Layanan dan Administrasi
  - 1) Tim PUR dan Operasi SP
    - a) Unit Distribusi Uang Kasir Senior
    - b) Unit Layanan dan Administrasi Kas Kasir Senior
    - c) Unit Pengelolaan Uang Kasir Senior
    - d) Unit Operasional SP Kepala Unit
  - 2) Tim Pengawasan SP, PUR dan KI Kepala Tim
    - a) Fungsi Perizinan dan Pengawasan SP PUR

b) Fungsi Analisis SP dan PUR serta KI dan Perlindungan Konumen

3) Satuan Layanan dan Administrasi Kepala Satuan

a) Fungsi SDM, Logistik Anggaran, Sekretriati, Protokol dan

Pengamanan.